

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Rancangan penelitian kualitatif**

Berkembangnya gagasan neoliberalisme (hampir) di seluruh dunia menjadikan neoliberalisme menjadi isu yang menarik untuk dikaji, baik dalam perspektif historis, teoritis maupun praktis - dengan menghasilkan kesimpulan seperti: penerimaan, koreksi atau bahkan penolakan sama sekali terhadap neoliberalisme/globalisasi.

Kebijakan (praktek) neoliberalisme di negara-negara berkembang yang terkesan dipaksakan oleh lembaga-lembaga keuangan internasional (IMF, World Bank) telah menyebabkan terjadinya berbagai penolakan dan kritikan terhadap neoliberalisme/globalisasi. Hal ini tidak terlepas dari praktek neoliberalisme yang seringkali mengeneralisir permasalahan hampir disemua negara-negara berkembang (menjalankan SAPs ke negara-negara yang sedang krisis), seperti: deregulasi, liberalisasi keuangan, penanaman modal asing, anggaran ketat, dan menjalankan privatisasi. Sehingga kondisi tersebut tidak jarang harus berhadapan (bertentangan) secara ideologis, historis, maupun konstitusional dengan negara “pasien” tersebut. Bahkan telah melahirkan berbagai permasalahan ekonomi dan sosial, seperti: kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, meningkatnya pengangguran dan kemiskinan (Stiglitz, 2006).

Begitu juga di Indonesia banyak UU yang bisa dikategorikan bersemangatkan neoliberalisme seperti, UU No 41/1999 tentang kehutanan, UU No 27/2003 tentang panas bumi, UU No 30/2007 tentang energi, UU No 10/2003 tentang ketenagakerjaan, UU No 20/2002 kelistrikan sampai kepada UU penanaman modal asing (UU No. 1) tahun 1967 yang telah melahirkan pro dan kontra dikalangan masyarakat.

PDI Perjuangan sebagai partai politik yang mendasarkan kepada gagasan-gagasan Soekarno (nasionalisme kerakyatan) dan mempunyai keterwakilan di lembaga legislatif harus dihadapkan secara *vis a vis* dengan neoliberalisme yang akan masuk

melalui jalur formal (terlebih dahulu menghapus hambatan-hambatan dan pembuatan aturan baru). Inilah yang terjadi ketika pemerintah menyampaikan draft RUU penanaman modal ke DPR, fraksi PDI Perjuangan melihat bahwa RUU tersebut bernapaskan neoliberalisme sehingga perlu dikawal secara ketat dan dibahas secara serius<sup>1</sup>.

Berangkat dari kondisi tersebut maka dalam penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana pergulatan PDI Perjuangan dalam menghadapi neoliberalisme; kasus penyusunan UU penanaman modal, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana peneliti terlebih dahulu melakukan studi dokumen terhadap pemaknaan nasionalisme dan neoliberalisme/globalisasi oleh PDIP (hasil kongres-II Bali tahun 2005), dan dokumen-dokumen resmi fraksi PDI Perjuangan dalam pembahasan RUU penanaman modal pada tahun 2006 – 2007 (RUU dari pemerintah – tanggapan fraksi-fraksi – tanggapan/pergulatan fraksi PDIP–menjadi UU) dan dilanjutkan dengan melakukan wawancara (konfirmasi dan pendalaman hasil studi) dengan informan yang berhubungan secara langsung dengan topik permasalahan.

### **3.2 Posisi dan Peran Peneliti**

1. Peneliti adalah mantan aktivis GMNI dari tahun 2000 – 2005 yang mempunyai kedekatan secara historis maupun ideologis<sup>2</sup> dengan PDI perjuangan, maka nilai dan keyakinan peneliti dalam penelitian ini sedikit banyak mempengaruhi peneliti didalam melakukan pengumpulan, analisa dan menyimpulkan hasil temuan lapangan. Namun peneliti mencoba secara maksimal (objektif) untuk

---

<sup>1</sup>Menurut Irmadi Lubis (mantan anggota pansus) bahwa ada dua semangat utama dalam RUU tersebut, yakni kesempatan yang sama dan jaminan untuk tidak ada nasionalisasi. Inilah yang mendasari sehingga UU ini bisa dikatakan “bernuansa” neoliberalisme.

<sup>2</sup>Secara historis (1953 – 1973) GMNI adalah underbouw PNI (Partai Nasional Indonesia) yang pada tahun 1973 melakukan fusi dengan berbagai partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), MURBA (Musyawarah Rakyat Banyak), PARTINDO (Partai Kristen Indonesia), dan PARKINDO (Partai Katholik Indonesia) menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan sejak itulah GMNI menyatakan menjadi organisasi mahasiswa yang independen, tidak terikat kepada satu kekuatan politik manapun. walaupun sampai sekarang alumni-alumni GMNI masih banyak yang aktif di PDIP baik struktural maupun fungsional. Secara Ideologis; GMNI mempunyai kesamaan sebagai organisasi penggusung gagasan – gagasan Soekarno

menyampaikan data secara apa adanya mengenai pergulatan PDI perjuangan dalam menghadapi neoliberalisme.

2. Latar belakang sebagai mantan aktivis GMNI telah memberikan banyak bantuan bagi peneliti untuk mengakses (mendapatkan) data maupun akses ke informan. Hal ini tidak terlepas dari faktor hubungan secara organisatoris, historis maupun ideologis yang selama ini terjalin, baik dengan *gate keepers* di eksternal maupun di internal PDI Perjuangan.
3. Aktivitas peneliti yang selalu berhubungan dengan gagasan pemikiran Soekarno, telah mendorong peneliti untuk melakukan studi mengenai relevansi pemikiran Soekarno di era globalisasi (neoliberalisasi) saat ini.

### 3.3 Data, Dokumen dan Informan

#### 3.3.1 Data dan Dokumen

Data dan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni dalam bentuk *soft copy* (CD resmi dan memindahkan data dari komputer fraksi PDI Perjuangan ke *flash disk* peneliti) maupun dalam bentuk dokumen, risalah, buku, artikel yang didapatkan dari internal dan eksternal PDI Perjuangan. Data dan dokumen dibagi menjadi tiga bagian yakni: data dan dokumen yang berhubungan dengan PDI Perjuangan, berhubungan dengan RUU penanaman modal, dan data-data dari media publik (cetak dan *online*)

Tabel 3.1 Data dan dokumen

No	Data dan Dokumen	Keterangan
1	Data dan dokumen mengenai PDI Perjuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil-hasil kongres-I PDI Perjuangan tahun 2000 di Semarang,</li> <li>• Hasil-hasil kongres-II PDI Perjuangan tahun 2005 di Bali</li> <li>• Pidato pembukaan kongres-III PDI Perjuangan tahun 2010 di Bali</li> <li>• Hasil-hasil Rakornas I tahun 2007 di Solo</li> <li>• Manifesto Nasionalisme Kerakyatan</li> </ul>

		PDI Perjuangan
2	Data dan Dokumen mengenai UU penanaman modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dari fraksi PDI Perjuangan <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Usulan, masukan dan perbaikan daftar inventarisasi masalah (DIM) Fraksi PDI Perjuangan untuk RUU penanaman modal</li> <li>➢ Surat dan dokumen resmi dari fraksi PDI Perjuangan, baik untuk internal partai, DPR-RI maupun yang ditujukan ke eksternal</li> </ul> </li> <li>• Risalah rapat penyusunan UU penanaman modal dari kesekretariatan jenderal DPR-RI</li> </ul>
3	Data dan dokumen dari media public	Media cetak: Kompas, Media Indonesia dan pemberitaan dari media on line.

### 3.3.2 Informan

Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang bersentuhan secara langsung dengan PDI Perjuangan dan/atau dalam proses penyusunan UU penanaman modal periode 2006 – 2007.

Tabel 3.2 Daftar informan

Informan	Waktu&Tempat	Keterangan
<b>Rachmat Handoyo</b> (staf ahli PDI Perjuangan untuk RUU penanaman modal)	Rabu, 11 Maret 2010, Gedung DPR-RI	Membicarakan permasalahan proses penyusunan UU penanaman modal, sekaligus mendapatkan beberapa data dan dokumen mengenai RUU penanaman modal.

	Jumat, 30 April 2010, Gedung DPR-RI	Wawancara untuk mengkonfirmasi dan melakukan pendalaman terhadap hasil studi dokumen (hasil wawancara terlampir)
<b>Irmadi Lubis</b> (Anggota pansus RUU Penanaman Modal dari fraksi PDI Perjuangan)	Senin, 3 Mei 2010, Cikoko, Jakarta Selatan	Wawancara dan konfirmasi hasil temuan lapangan peneliti (hasil wawancara terlampir)
<b>Taufik Kiemas</b> (tokoh senior PDI Perjuangan, aktivis PDI tahun 70-an)	Jumat, 23 april 2010, Gedung MPR-RI	Wawancara mengenai pemaknaan neoliberalisme dan nasionalisme kerakyatan PDI Perjuangan (hasil wawancara terlampir)

### 3.4 Prosedur Pengumpulan Data

Didalam penelitian ini menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Pengumpulan data dan dokumen mengenai PDI Perjuangan: aturan partai, kebijakan, risalah, artikel pasca kongres-II Bali tahun 2005 sampai dengan pelaksanaan kongres-III tahun 2010. Kemudian diinventarisir dan dianalisa menjadi dua kategori yakni kategori “nasionalisme” dan ketegori “neoliberalisme” (terlampir). Ini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah untuk melihat pemaknaan nasionalisme dan neoliberalisme oleh PDI perjuangan.
2. Pengumpulan data dan dokumen mengenai UU penanaman modal: mulai draft RUU dari pemerintah, tanggapan fraksi-fraksi, sampai dengan menjadi UU. Data tersebut kemudian dibuat tabel sehingga mempermudah peneliti melihat pokok-pokok permasalahan dan proses pergulatan dalam penyusunan UU penanaman modal.
3. Melakukan wawancara dengan informan (sesuai kebutuhan) guna mendapatkan informasi dan konfirmasi hasil studi.

### 3.5 Proses Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan baik dari internal maupun eksternal PDI Perjuangan, seperti data mengenai PDIP dan UU penanaman modal. Data didapatkan dari anggota pansus, sekretariat fraksi, kesekjenan DPR-RI maupun dari berbagai sumber (media, makalah seminar dan lain sebagainya).

### **3.5.1 Pengumpulan data dari PDI Perjuangan**

Dalam mendapatkan ijin penelitian peneliti terlebih dahulu melakukan pendekatan baik secara personal maupun formal (mengajukan surat resmi dari UI), ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan lamanya proses surat penelitian yang diajukan ke DPP maupun fraksi PDI Perjuangan<sup>3</sup>. Ini kemudian terbukti karena ijin penelitian secara formal tidaklah didapat oleh peneliti. Namun kondisi tersebut akhirnya dapat dicari jalan keluarnya setelah bertemu dengan salah satu anggota DPR-RI (senior peneliti di organisasi GMNI) yang bersedia membantu, baik untuk mendapatkan data maupun akses ke informan.

Kemudian pengumpulan data dilanjutkan dengan cara melakukan pendekatan personal (peneliti mantan aktivis GMNI) sehingga memudahkan peneliti untuk mengakses dan berhubungan dengan staf fraksi, pengurus DPP dan dan anggota fraksi DPR-RI. Dari pendekatan tersebut akhirnya peneliti dapat mengakses data baik yang berhubungan dengan PDI perjuangan (hasil-hasil kongres, manifesto nasionalisme kerakyatan dan lain sebagainya) maupun data dan dokumen dari fraksi PDI Perjuangan dalam proses penyusunan UU penanaman modal, baik dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy* (DIM, surat resmi, pandangan-pandangan fraksi).

Begitu pula halnya dengan informan, setelah berdiskusi banyak dengan *gate keeper* diinternal PDI perjuangan, akhirnya diputuskan<sup>4</sup> untuk memilih informan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti, yakni yang berhubungan dengan PDI Perjuangan (Taufik

---

<sup>3</sup>Hal ini dikarenakan pada waktu peneliti menyampaikan surat ke DPP PDIP dan Fraksi, secara bersamaan pula PDI perjuangan akan mengadakan kongres ke III di Bali. Sehingga baik pengurus DPP (dewan pimpinan pusat) maupun anggota fraksi PDI Perjuangan semuanya terfokus untuk mensukseskan acara tersebut

<sup>4</sup>Setelah mendapatkan informasi, dan sesuai dengan yang tercantum di risalah penyusunan UU penanaman modal, maka dilakukan wawancara dengan Irmadi Lubis

Kiemas)<sup>5</sup>, dan untuk RUU penanaman modal dengan Irmadi Lubis yang cukup menguasai permasalahan dan berperan aktif dalam proses penyusunan UU penanaman modal<sup>6</sup>.

Setelah menetapkan informan, selanjutnya peneliti melakukan pendekatan personal untuk dimintai kesediaan diwawancarai. Setelah mendapatkan kesediaan untuk diwawancarai, maka peneliti melakukan wawancara dengan terlebih dahulu menyampaikan surat formal dari UI (surat pengantar) sebagai bukti bahwa penelitian ini dilakukan untuk kepentingan akademis.

### **3.5.2 Pengumpulan data dari luar PDI Perjuangan**

Guna mendapatkan data mengenai risalah rapat penyusunan UU penanaman modal, peneliti terlebih dahulu mendatangi staf komisi VI (komisi yang bertanggung jawab dalam penyusunan UU penanaman modal). Namun berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa staf komisi VI tidak berhak mengeluarkan data tersebut, dan diarahkan (suratnya) ke sekjen DPR-RI. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya peneliti meminta surat ke program magister sosiologi (UI) perihal permintaan data risalah penyusunan UU penanaman modal. Kemudian setelah mendapatkan surat dari program, maka peneliti langsung menyampaikan surat tersebut ke staf sekjen DPR-RI lantai 3 gedung kesekjenan DPR-RI. Kemudian dua hari setelah disampainya surat ke sekjen, peneliti mengkonfirmasi ternyata surat telah mendapatkan persetujuan dari sekjen dan diteruskan ke bagian data dan dokumen.

---

<sup>5</sup>Dilihat dari struktur kepengurusan dan informasi yang didapat, peneliti di awalnya berencana untuk melakukan wawancara dengan ketum, sekjen, ketua bidang politik dan deperpu DPP PDI Perjuangan. Namun berhubung ketum, sekjen dan ketua bidang politik sedang mempersiapkan kongres (sibuk dan banyak keluar kota), dan keterbatasan waktu penyelesaian tesis (1 semester). Akhirnya wawancara hanya bisa dilakukan dengan ketua deperpu (dewan pertimbangan pusat 2005 - 2010) Taufik Kiemas.

<sup>6</sup>Catatan, informasi yang didapat dan hasil studi dokumen, bahwasannya Hasto Kristiyanto dan Irmadi Lubis adalah dua anggota pansus dari PDI Perjuangan (dari 9 anggota) yang cukup menguasai permasalahan dan berperan aktif dalam penyusunan RUU penanaman modal. Namun untuk Hasto Kristiyanto tidak bisa dilakukan wawancara berhubung adanya kongres, dan terpilihnya beliau menjadi wasekjen DPP PDI Perjuangan. Namun peneliti pernah bertemu untuk membicarakan penelitian ini, karena kesibukan (bertemu sebentar: banyak agenda, dan tamu dari daerah) akhirnya beliau mengarahkan untuk bertemu dengan sekretaris untuk mendapatkan beberapa data dan tulisan selama menjadi anggota pansus.

Kemudian peneliti mengkonfirmasi kebagian data dan dokumen dan disarankan untuk mengambil data keesokan harinya. Keesokan harinya peneliti datang ke DPR-RI (nusantara II lantai 2) dan mendapatkan data risalah UU penanaman modal dalam bentuk CD.

Selain mendapatkan data dari kesekjenan DPR-RI, peneliti juga mencari dan mendapatkan data baik dari media cetak, media *on line*, perpustakaan, mesin pencari google maupun dari sahabat-sahabat peneliti yang masih menyimpan beberapa data yang bisa digunakan untuk penelitian ini. Data tersebut dalam bentuk artikel, makalah, pemberitaan, pernyataan sikap, surat resmi, dan lain sebagainya.

### **3.6 Permasalahan dan Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini adalah waktu yang dimiliki dalam melakukan pengumpulan data lapangan, menganalisa, dan menuangkan data ke tesis sangatlah terbatas ( $\pm 3$  bulan). Kondisi ini disebabkan karena:

1. Studi ini di awalnya dimaksudkan untuk melakukan penelitian “pergulatan PDI Perjuangan dalam menghadapi neoliberalisme: studi kasus pada kongres ke-III tahun 2010 di Bali”. Namun berdasarkan informasi yang didapat baik di internal maupun pemberitaan di media, bahwa pergulatan tersebut tidaklah signifikan, ditambah lagi dengan belum keluarnya ijin penelitian dari PDI Perjuangan, maka diputuskan untuk mengganti kasus menjadi pergulatan PDIP dalam menyusun UU penanaman modal.
2. Penelitian yang dilakukan bersamaan dengan padatnya jadwal di internal PDI Perjuangan, baik di pengurus pusat maupun anggota fraksi, seperti: padatnya anggota DPR dalam kasus *century gate*, persiapan pelaksanaan kongres ke III yang dilaksanakan 6 – 9 april 2010 di Bali dan pelaksanaan hasil putusnya, telah

menyebabkan sulitnya peneliti untuk mendapatkan data, melakukan wawancara dan melakukan validasi terhadap hasil temuan lapangan<sup>7</sup>.

3. Keterbatasan waktu tersebut kemudian telah menyebabkan keterbatasan peneliti secara metodologis dalam melakukan wawancara dan pengumpulan data guna melihat proses kontestasi yang terjadi di internal anggota fraksi PDI Perjuangan dalam proses penyusunan UU penanaman modal.
4. Begitu pula halnya dengan informan, dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, maka informan yang wawancarai hanya representasi dari pokok-pokok permasalahan yang akan ditanyakan. Seperti informasi mengenai PDI Perjuangan hanya melakukan wawancara dengan Taufik Kiemas (ketua Deperpu DPP PDI Perjuangan 2005 – 2009), dan mengenai proses pembahasan UU penanaman modal dengan staff ahli dan anggota pansus dari fraksi PDI Perjuangan.

### 3.7 Waktu Penelitian<sup>8</sup>

No	Kegiatan	Waktu															
		Maret				April				Mei				Juni			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Ujian proposal (18 Feb)																
2	Pengumpulan data Lapangan																
3	Analisa data																
4	Seminar hasil temuan lapangan																
5	Perbaiki tesis																
6	Ujian akhir																

### 3.8 Analisa dan Interpretasi Data

<sup>7</sup>Peneliti mendapatkan informasi dari calon informan seperti Bung Tcahyo Kumolo via SMS, bahwa beliau lebih banyak di daerah dan menyusun, mempersiapkan pelaksanaan hasil kongres, sehingga wawancara tidak bisa dilakukan. Begitu juga halnya dengan pengambilan data.

<sup>8</sup>Ujian proposal dilakukan pada tanggal 18 Februari 2010, dan perubahan studi kasus pada tanggal 5 maret 2010

Analisa yang dilakukan dalam penelitian ini hampir bersamaan dengan waktu pengumpulan data, interpretasi dan membuat (laporan) penulisan temuan lapangan. Analisa dilakukan dengan cara sebagai berikut;

1. Mengumpulkan data dan informasi dari lapangan (dokumen dan wawancara)
2. Membuat transkrip data; memindahkan data dari tulisan dan rekaman kedalam komputer secara apa adanya (*verbatim*)
3. Menyortir data-data sehingga masuk kedalam kelompoknya dalam bentuk tabel, seperti: data-data hasil kongres-II dan III di Bali (untuk melihat pemaknaan nasionalisme dan neoliberalisme) maupun melakukan inventarisir terhadap data-data mengenai draft rancangan UU penanaman modal (terlampir)
4. Mengintrepretasikan data dengan menggunakan tabel, agar data dan informasi yang diperoleh dapat terlihat secara jelas, dengan cara menganalisa berdasarkan isu spesifik yang telah ditetapkan sebelumnya.
5. Menggunakan bantuan komputer sehingga data yang didapatkan akan langsung dimasukkan dan dikategorikan, sehingga memudahkan peneliti untuk mencari dan menggunakan data tersebut.

### **3.9 Strategi Validasi Temuan Penelitian**

Guna mendapatkan hasil temuan yang valid maka didalam penelitian ini akan menggunakan langkah-langkah pembuktian dengan cara;

1. Triangulasi; data yang dikumpulkan melalui sumber majemuk kemudian dikomparasikan dengan berbagai data seperti dari studi dokumen, dan hasil wawancara.
2. Data yang telah dikumpulkan, dintrepretasikan kemudian dikonfirmasi kembali kepada informan, seperti pokok-pokok permasalahan (pergulatan) dalam penyusunan UU penanaman modal.
3. Data dan informasi (hasil wawancara) yang didapatkan kemudian direkonfirmasi dengan data dan risalah resmi penyusunan UU penanaman modal yang dikeluarkan oleh pusat data kesekjenan DPR-RI. Ini dimaksudkan agar hasil analisa dan temuan lapangan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

### **3.10 Sistematika Penulisan Tesis**

Dalam penulisan tesis ini peneliti terlebih dahulu menyampaikan latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan (tujuan dan manfaat penelitian). Kemudian penulis menyampaikan kajian pustaka dan literatur (kajian literatur yang pernah dilakukan sebelumnya) sebagai kerangka penulis dalam melakukan penelitian. Pada bab III penulis menyampaikan metode penelitian dan dilanjutkan dengan pembahasan (bab IV – VI) dan diakhiri dengan kesimpulan pada bab VII.

Secara rinci berikut ini akan disampaikan sistematika penulisan tesis:

**Bab I**, peneliti menyampaikan latar belakang, rumusan, tujuan serta signifikansinya mengapa penelitian ini perlu dilakukan, kemudian dilanjutkan dengan membuat batasan penelitian agar penelitian tetap fokus sesuai dengan tujuan dilaksanakannya penelitian. Bab ini memuat latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan dan apa manfaat penelitian ini baik secara akademis maupun praktis, sehingga penelitian ini dapat terus dilanjutkan.

**Bab II**, pada bab ini peneliti mengulas sekilas mengenai literatur studi yang pernah dilakukan, ini dimaksudkan agar penelitian tesis ini tidak mengulang penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Begitu juga halnya dengan kajian teori yang dibuat, ini dimaksudkan agar penulis mempunyai dasar, arah dan haluan untuk melakukan penelitian.

**Bab III**, pada bab ini peneliti menyampaikan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan (kualitatif), peran peneliti, proses pengumpulan data, strategi pengumpulan data, validasi sampai kepada sistematika penulisan tesis. Ini dimaksudkan agar penelitian ini memenuhi standar akademis sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

**Bab IV**, bab ini mulai masuk tahap pembahasan, dimana peneliti terlebih dahulu menyampaikan gambaran umum mengenai objek penelitian “Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP)” mulai dari sejarah kelahiran PDI, menjadi PDI Perjuangan, hasil kongres I – sampai dengan kongres II yang dilaksanakan di Bali tahun 2005. Ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara utuh mengenai ideologi, kesepakatan nasional dan proses pergulatan di internal partai tersebut.

**Bab V**, pada bab ini mulai dibahas mengenai studi kasus dari penelitian ini yakni proses (pergulatan) penyusunan undang-undang penanaman modal yang seringkali diidentikkan dengan neoliberalisme. Pertama peneliti menyampaikan mengapa revisi rancangan undang-undang ini harus dilakukan (usulan pemerintah) dan apa problematika yang paling mendasar sehingga pembahasan RUU penanaman modal ini telah melahirkan pro dan kontra dimasyarakat. Dalam bab ini mulai disinggung mengenai berbagai permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan RUU penanaman modal; (*pertama*) hak guna usaha (HGU), hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai, (*kedua*) perlakuan yang sama antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri, (*ketiga*) mengenai berbagai fasilitas yang diberikan kepada penanam modal baik asing maupun dalam negeri, (*keempat dan terakhir*) adalah permasalahan pemberian izin terhadap tenaga asing yang bekerja di Indonesia.

Dari keempat permasalahan tersebut kemudian dilanjutkan dengan proses pergulatan fraksi PDI Perjuangan dalam menyusun dan membahas RUU penanaman modal (bab VI), baik dalam tahap pertama (rapat komisi VI, pansus, tim kecil, tim perumus dan tim sinkronisasi), maupun tahap kedua (rapat paripurna) yang dilaksanakan dalam rangka mengambil keputusan terhadap RUU penanaman modal (tanggal 29 Maret 2007). Dari pergulatan tersebut dapat dilihat bagaimana fraksi PDI Perjuangan melakukan proses pengkritisan, penambahan redaksional, memberikan usulan bahkan penolakan terhadap berbagai permasalahan yang sedang dihadapi. Sehingga tidaklah salah apabila seorang staf ahli DPR dari fraksi PDI Perjuangan mengatakan bahwa fraksi PDI Perjuangan selalu memberikan warna (berperan secara aktif) baik dalam rapat pleno komisi VI maupun dalam Pansus RUU penanaman modal.

Filename: BAB III  
Directory: F:  
Template: C:\Documents and Settings\T o m y\Application  
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm  
Title:  
Subject:  
Author: Tomy  
Keywords:  
Comments:  
Creation Date: 7/12/2010 7:00:00 PM  
Change Number: 1  
Last Saved On: 7/12/2010 7:00:00 PM  
Last Saved By: Tomy  
Total Editing Time: 1 Minute  
Last Printed On: 7/13/2010 8:16:00 AM  
As of Last Complete Printing  
Number of Pages: 12  
Number of Words: 3,313 (approx.)  
Number of Characters: 18,889 (approx.)

